



EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Fitri Wina Ranti, Renny Maisyarah

Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara melihat dan menganalisis dokumen dan melihat secara menyeluruh terhadap penerapan dan implementasi SPIP yang dijalankan pada tahun 2023. Fungsi SPIP adalah sebagai kerangka kerja untuk memastikan tata kelola pemerintahan apakah sudah sesuai dengan standard serta memperkuat akuntabilitas publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara telah mencapai level maturitas SPIP terdefinisi, yang mencerminkan proses pengendalian intern yang terdokumentasi dan sistematis. Selain itu, tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah mencapai level "delivered", yang menandakan fungsi pengawasan berjalan efektif dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Hasil dari penelitian ini semakin menunjukkan pentingnya komitmen dari pemerintah, penguatan praktik manajemen risiko, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Jika semua sudah terwujud maka tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat terhadap pelayanan publik di pemerintah daerah X.

Kata Kunci: Pengendalian Intern, Pemerintah Daerah, Evaluasi, SPIP.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan entitas publik, dimana tanggung jawabnya besar dalam mengelola keuangan dan sumber daya negara secara transparan, akuntabel, dan

efisien. Mengingat dana yang dikelola bersumber dari publik maka dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu sistem yang dapat memastikan bahwa setiap kegiatan dan pengelolaan anggaran dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan. Hal ini

*Correspondence Address : winaranty@yahoo.com

DOI : 10.31604/jips.v13i7.2026.1637-1643

© 2026UM-Tapsel Press

bertujuan demi keselarasan antara pemerintah dan masyarakat di dalamnya. Salah satu sistem yang berperan penting dalam hal ini adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).

SPIP dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundangundangan (Amelia & Halim, 2023). Meskipun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat awam yang tidak memahami mengenai apa yang dikerjakan pemerintah dalam mengelola dana publik, tapi melalui SPIP diharapkan masyarakat dapat merasakan dampak nyata dari setiap kebijakan dan program yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam hal pemerintah daerah, penerapan SPIP masih harus banyak berbenah dimana fokusnya adalah mencegah terjadinya penyimpangan anggaran, korupsi, dan inefisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Kendalanya adalah masih banyak satuan kerja belum sepenuhnya memahami atau melaksanakan prinsip-prinsip pengendalian intern secara optimal (Indriani & Siswantoro, 2023). Akibatnya akan banyak penyimbangan yang akan terjadi dalam pelaksanaan SPIP di pemerintah daerah. Hasil penilaian maturitas SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih berada pada level sedang (Level 2 atau 3), yang artinya belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan pengendalian intern.

Merujuk hal di atas, evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP sangat penting dilakukan. Dari sini pemerintah daerah dapat mengetahui kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian internal serta merumuskan perbaikan

untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Evaluasi dilakukan berdasarkan pedoman penilaian maturitas SPIP dari BPKP serta dikaitkan dengan laporan kinerja dan audit internal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan penilaian maturitas SPIP dan laporan hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan SPIP Pemerintah Daerah Sumatera Utara?
2. Apa saja temuan audit yang menunjukkan kelemahan pengelolaan SPIP pada pemerintahan daerah Sumatera Utara?
3. Bagaimana efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah Sumatera Utara dalam mencegah terjadinya fraud?
4. Apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi SPIP pemerintah daerah Sumatera Utara?

Tujuan Penelitian

Secara spesifik, tujuan penelitian untuk mengevaluasi terhadap Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Provinsi X Tahun 2024 meliputi:

1. **Menilai Kepatuhan Hukum:** Memastikan bahwa penerapan SPIP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Verifikasi kerangka kerja yang tertuang di SPIP**

apakah sudah sesuai dengan visi misi pemerintah daerah X.

3. **Mendeteksi Kecurangan:** Mengidentifikasi potensi penyimpangan atau aliran dana ilegal (seperti *money laundering* atau donasi gelap) dalam pelaporan keuangan pada APBD.
4. **Mendorong Akuntabilitas Publik:** Memberikan keyakinan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa SPIP pemerintah daerah X sesuai dengan visi misi.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi X pada tahun 2024. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam dan objektif mengenai efektivitas pengendalian intern serta fungsi pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.

Analisis berfokus pada dua indikator utama, yaitu:

1. Tingkat Maturitas SPIP: yang mencerminkan sejauh mana penerapan sistem pengendalian internal telah terdokumentasi, terstruktur, dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Tingkat Kapabilitas APIP: yang menunjukkan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi pengawasan internal secara efektif berdasarkan model

Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang diadaptasi oleh BPKP. Selain itu dilakukan pengecekan juga terhadap hasil laporan dari provinsi yang berdekatan sebagai pembanding apakah laporan yang digunakan oleh pemerintah daerah X sudah sesuai standard atau belum. Dengan demikian, hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan gambaran faktual yang relevan dan mendalam tentang kondisi aktual pelaksanaan SPIP dan fungsi pengawasan di wilayah tersebut.

Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian adalah laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 dan Laporan Penilaian Maturitas SPIP serta APIP yang diterbitkan oleh BPKB perwakilan provinsi tahun 2023. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2026.

Sumber Data

Data Primer

Data primer diperoleh melalui:

- Wawancara dengan aparat pemerintah daerah
- Auditor independen
- Inspektorat

Data Sekunder

Data sekunder meliputi:

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023
- Dokumen audit
- laporan penilaian maturitas SPIP serta kapabilitas APIP yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi

Teknik Pengumpulan Data

1. **Wawancara Mendalam**
Dilakukan untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan dan penerapan SPIP di pemerintah daerah X.
2. **Dokumentasi**
Mengumpulkan dokumen laporan keuangan dan hasil audit.
3. **Observasi**
Mengamati prosedur pencatatan laporan kinerja instansi pemerintah daerah X. Mengamati laporan penilaian maturitas SPIP dan APIP yang diterbitkan oleh BPKP daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Letaknya strategis dan memiliki berbagai suku budaya sehingga membuat provinsi Sumatera Utara sebagai provinsi dengan perbedaan yang beragam. Selain itu wilayah geografis provinsi Sumatera Utara juga luas sekitar 72.981,23 km².

Dalam rangka memberikan arah bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, sasaran, program serta rencana kerja yang terukur dan selaras dengan organisasi BPKP. Selanjutnya, sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara menyusun dan menyajikan laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 melaporkan capaian kinerja selama tahun 2024. Capaian ini diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Sehingga Perjanjian Kinerja ini dijadikan landasan apakah kinerja tahun 2024 tercapai atau tidak. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2024 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Di dalam Renstra BPKP Tahun 2020-2024, tujuan dan sasaran strategis dijabarkan ke dalam program dan sasaran program. Terdapat 2 (dua) program yang dimiliki BPKP, yaitu Program 01: Program Dukungan Manajemen Internal dan Program 06: Program Pengawasan Pembangunan.

Tabel 1. Capaian Tingkat Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP Pemda Kab/Kota di 15 Kabupaten Provinsi Sumatera Utara

Wilayah	Level SPIP	Predikat	Level APIP	Predikat
Prov Sumatera Utara	3	Terdefinisi	3	Delivered
Kota Medan	3	Terdefinisi	3	Delivered
Kabupaten Tapanuli Selatan	3	Terdefinisi	3	Delivered
Kabupaten Toba	2	Berkembang	3	Delivered
Kota Tebing Tinggi	3	Terdefinisi	3	Delivered
Kabupaten Labuhanbatu Utara	2	Berkembang	3	Delivered
Kabupaten Tapanuli Utara	3	Terdefinisi	3	Delivered
Kabupaten Deli Serdang	3	Terdefinisi	3	Delivered
Kabupaten Humbang Hasundutan	3	Terdefinisi	3	Delivered
Kota Binjai	3	Terdefinisi	3	Delivered
Kabupaten Dairi	2	Berkembang	3	Delivered
Kabupaten Karo	2	Berkembang	3	Delivered
Kota Padangside mpuan	3	Terdefinisi	2	Structured

Kota Gunungsitoli	2	Berkembang	3	Delivered
Kabupaten Serdang Bedagai	3	Terdefinisi	3	Delivered

Sumber : Laporan Kinerja Sumatera Utara 2024

Berdasarkan hasil audit terhadap kinerja tahun 2024 di provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan bahwa target capaian seluruh Kabupaten/Kota yang mendapat level maturitas SPIP ≥ 3 (level terdefinisi) adalah minimal 10 (66%) dari 15 sampel Kabupaten/Kota yang disajikan dalam tabel. Selain itu secara keluruhan nilai SPIP di Provinsi Sumatera Utara itu sendiri sudah mencapai level maturitas SPIP ≥ 3 (level terdefinisi). Level ini mencerminkan bahwa sistem pengendalian pemerintah baik provinsi maupun daerah telah diterapkan secara baik untuk mendukung terciptanya akuntabilitas dan transparansi publik.

Kapabilitas aparat pengendalian internal pemerintah (APIP) mengacu pada standar yang dikembangkan di Internal Audit Capability Model. Kapabilitas APIP mengukur kemampuan instansi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien. Penilaian kapabilitas ini mengacu pada model yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA) yang diadaptasi oleh BPKP untuk pengawasan sektor publik di Indonesia. Pada tabel terlampir dapat dilihat bahwa 90% pemerintah daerah di Sumatera Utara mencapai level kapabilitas APIP delivered (level 3). Pencapaian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi pengawasan secara baik, sistematis, dan terdokumentasi. Level kapabilitas ini juga mencerminkan tingkat kemampuan APIP untuk menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nilai tambah bagi organisasi (Darmayanti et al., 2023).

Meskipun demikian, capaian di atas belum dianggap cukup untuk

kemajuan semua sektor di setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Karena capaian tersebut belum cukup untuk menjamin capaian yang unggul, untuk dapat mencapai level unggul maka pemerintah provinsi Sumatera Utara harus mengejar level 4 (integratif) atau 5 (optimum). Selain itu masih ada 5 dari total sampel yang disajikan dalam tabel 1 mendapat level maturitas SPIP 2 (berkembang) dan level kapabilitas APIP 2 (structured). Artinya masih ada tugas dari setiap pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengejar level maturitas SPIP minimal 3 (terdefinisi) dan kapabilitas APIP 2 (delivered).

Target Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 pada Tahun 2024 sebanyak 10 Kabupaten/Kota. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 telah tercapai sebanyak 5 Kabupaten/Kota atau 50% dari target. Terdapat perbedaan antara target Perkin Tahun 2024 sebanyak 10 Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 dengan target Renstra Perwakilan sebanyak 5 Kabupaten/Kota yang disebabkan target yang ditetapkan oleh Kedeputusan lebih rendah daripada target Kepala BPKP sehingga pada Perwakilan Sumatera Utara ditambah target Perkin-nya. Berdasarkan target kinerja di atas maka sebenarnya target kinerja provinsi Sumatera Utara sudah tercapai.

Maka dari itu, diperlukan strategi penguatan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme para auditor internal, baik melalui pelatihan teknis, sertifikasi profesi, maupun pengembangan soft skills yang relevan. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses audit perlu ditingkatkan guna mendukung efisiensi, akurasi, dan cakupan pengawasan. Selain penguatan kapasitas individu dan pemanfaatan teknologi, keberhasilan

peningkatan kapabilitas APIP juga sangat bergantung pada dukungan struktural dan kelembagaan. Regulasi yang mendukung peran APIP secara independen dan anggaran yang memadai menjadi elemen krusial untuk menjaga keberlanjutan penguatan fungsi pengawasan internal. Tanpa dukungan tersebut, upaya peningkatan kapabilitas berpotensi stagnan atau bahkan mengalami kemunduran. Oleh karena itu, strategi peningkatan harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi, sebagaimana diungkapkan oleh Darmayanti et al. (2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi Sumatera Utara tercapai, dapat dilihat bahwa 60% pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah mencapai level maturitas SPIP pada kategori terdefinisi (Level 3) dari target kinerja 2024 adalah 50%. Capaian ini mencerminkan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara terdokumentasi, sistematis, dan konsisten. Penerapan tersebut menunjukkan adanya komitmen organisasi yang kuat serta penerapan awal praktik manajemen risiko yang terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, kapabilitas APIP di 90% wilayah juga berada pada level delivered (Level 3), menandakan bahwa fungsi pengawasan telah dijalankan secara efektif dan memberikan nilai tambah terhadap akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Variasi skor antar wilayah yang relatif kecil mengindikasikan konsistensi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal di tingkat daerah.

Saran

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa capaian provinsi Sumatera Utara belum dianggap cukup untuk kemajuan semua sektor di setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara meskipun sudah mencapai target kinerja yang dibuat di tahun 2024. Karena capaian tersebut belum cukup untuk menjamin capaian yang unggul, untuk dapat mencapai level unggul maka pemerintah provinsi Sumatera Utara harus mengejar level 4 (integratif) atau 5 (optimum). Selain itu masih ada 5 dari total sampel yang disajikan dalam tabel 1 mendapat level maturitas SPIP 2 (berkembang) dan level kapabilitas APIP 2 (structured). Artinya masih ada tugas dari setiap pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengejar level maturitas SPIP minimal 3 (terdefinisi) dan kapabilitas APIP 2 (delivered).

Maka dari itu, diperlukan strategi penguatan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme para auditor internal, baik melalui pelatihan teknis, sertifikasi profesi, maupun pengembangan soft skills yang relevan. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses audit perlu ditingkatkan guna mendukung efisiensi, akurasi, dan cakupan pengawasan. Selain penguatan kapasitas individu dan pemanfaatan teknologi, keberhasilan peningkatan kapabilitas APIP juga sangat bergantung pada dukungan struktural dan kelembagaan. Regulasi yang mendukung peran APIP secara independen dan anggaran yang memadai menjadi elemen krusial untuk menjaga keberlanjutan penguatan fungsi pengawasan internal. Tanpa dukungan tersebut, upaya peningkatan kapabilitas berpotensi stagnan atau bahkan mengalami kemunduran. Oleh karena itu, strategi peningkatan harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi,

Fitri Wina Ranti, Renny Maisyarah

Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Provinsi Sumatera Utara.....(Hal 1637-1643)

sebagaimana diungkapkan oleh
Darmayanti et al. (2023).